

**KEBERHASILAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) MINA JAYA
KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PENDEKATAN TRIPARTITE**

(The Success of KUD Mina Jaya in Bandar Lampung City Based on Tripartite Approach)

Clara Yolandika, Dyah Aring Hepiana Lestari, Suriaty Situmorang

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1
Bandar Lampung 35145, Telp. 081369388790, e-mail: clarayolandika@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze: (1) the financial performance of KUD Mina Jaya reviewed by financial ratio, (2) the contribution of KUD Mina Jaya towards development, and (3) the prosperity rate of KUD Mina Jaya members and compares them based on their status as fisherman. This research was conducted in KUD Mina Jaya. There were four level of fisherman, namely ship owner, sailor, ship machine (KKM), and ship crew (ABK). The numbers of samples are 92 persons that consist of 36 fishermen from the ship with more than 10 ABK and 56 fishermen from the ship with less than 10 ABK. The data analysis method used was the financial ratio analysis, contribution analysis towards development, the analysis of fishermen's household income, and the analysis of prosperity rate based on Sajogyo criteria (1997). The results of this research showed that (1) the financial performance of KUD Mina Jaya reviewed from financial ratio are very good based on solvability and profitability ratio, but it is still in good category based on liquidity ratio, (2) KUD Mina Jaya has contributed towards the development of Lampung Province from 2010 until 2014, with good category based on the obedient of cooperation to pay taxes, the average ratio of labor absorption, and the average of the labor wage rate, and (3) KUD Mina Jaya has been successful enough to make prosperity of its members, unless the ship owner in the ship with more than 10 ABK, which mostly has been categorize in proper life.

Key words: development, finance, KUD, prosperity, tripartite

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak koperasi, akan tetapi banyak sekali koperasi yang berstatus pasif. Berdasarkan sebaran jumlah koperasi di Provinsi Lampung terlihat bahwa dari 3.727 unit koperasi yang ada di Provinsi Lampung, hanya 60,3 persen koperasi yang memiliki status aktif, dan sisanya merupakan koperasi pasif. Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Lampung. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (2014), salah satu koperasi di Kota Bandar Lampung yang aktif dan berhasil adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya. Koperasi tersebut bergerak di bidang produksi perikanan dan memiliki beberapa unit usaha, yaitu pelelangan ikan, simpan pinjam, sewa perahu dan alat tangkap untuk nelayan, penyediaan solar dan es batu untuk nelayan, penyewaan ruko, serta pengadaan air bersih.

Kinerja dari unit usaha yang dijalankan dapat menentukan keberhasilan koperasi sebagai suatu badan usaha. Akan tetapi, keberhasilan dari suatu

koperasi tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan koperasi sebagai badan usaha saja.

Tabel 1. Sebaran jumlah koperasi di Provinsi Lampung per kabupaten/kota berdasarkan status keaktifan, tahun 2013 (unit)

No.	Kabupaten/ Kota	Aktif	Pasif	Total
1.	Bandar Lampung	521	259	780
2.	Lampung Tengah	261	268	529
3.	Lampung Timur	202	201	403
4.	Lampung Utara	296	106	402
5.	Lampung Selatan	142	220	362
6.	Tanggamus	168	72	240
7.	Way Kanan	127	79	206
8.	Metro	106	62	168
9.	Lampung Barat	120	47	167
10.	Pringsewu	80	71	151
11.	Pesawaran	74	65	139
12.	Tulang Bawang	109	13	122
13.	Mesuji	43	43	58
14.	T. Bawang Barat	0	0	0
Jumlah		2.249	1.478	3.727

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2014

Menurut Hanel (1989), keberhasilan koperasi dapat diukur melalui tiga pendekatan (pendekatan tripartite), yaitu keberhasilan koperasi sebagai badan usaha, keberhasilan koperasi dalam berkontribusi terhadap pembangunan, dan keberhasilan koperasi untuk menyejahterakan anggota. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat Hanel (1989), maka tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis keberhasilan KUD Mina Jaya sebagai badan usaha ditinjau dari rasio keuangan, (2) menganalisis kontribusi KUD Mina Jaya terhadap pembangunan, dan (3) menganalisis kesejahteraan anggota KUD Mina Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KUD Mina Jaya, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan kondisi di lapangan, maka sampel pada penelitian ini adalah nelayan anggota KUD Mina Jaya yang dibagi menjadi dua strata, yaitu nelayan pada kapal dengan ABK > 10 orang dan nelayan pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang. Penentuan jumlah sampel mengacu pada jumlah juragan pada setiap strata, di mana jumlah sampel yang diambil adalah 10% dari masing-masing jumlah juragan, sehingga diambil 9 orang juragan pada kapal dengan ABK > 10 orang dan 14 orang juragan pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang, dimana dari masing-masing juragan diambil satu orang nahkoda, satu orang KKM, dan satu orang ABK, sehingga diperoleh jumlah sampel keseluruhan adalah 92 orang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus, anggota, dan karyawan KUD Mina Jaya, serta kepada para nelayan, dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kuesioner tersebut meliputi kontribusi koperasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan anggota. Data sekunder diperoleh dari data yang dikutip langsung dari KUD Mina Jaya, seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan, serta data yang dikutip dari instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian.

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah analisis rasio keuangan. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan ke dua dianalisis berdasarkan ketaatan koperasi membayar pajak, rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, rasio tingkat upah

karyawan, yang merujuk panduan pemeringkatan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dan untuk menjawab tujuan ke tiga digunakan analisis tingkat kesejahteraan melalui pendekatan pengeluaran per kapita per tahun setara beras menurut kriteria Sajogyo (1997).

Keberhasilan Koperasi sebagai Badan Usaha

Analisis rasio keuangan

Menurut Fadli (2012), salah satu cara untuk mengukur kinerja koperasi sebagai badan usaha adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan KUD Mina Jaya digolongkan menjadi tiga, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Menurut Afriyeni (2008), rasio likuiditas dapat digunakan untuk melihat kinerja koperasi dalam jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas digunakan untuk melihat kinerja koperasi dalam jangka panjang. Kondisi keuangan yang baik dalam jangka pendek tidak menjamin adanya kondisi yang baik pada jangka panjang, sehingga rasio solvabilitas dan rentabilitas harus dianalisis untuk melengkapi rasio likuiditas. Pengukuran rasio keuangan menggunakan standar pengukuran menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 129/Kep./M/KUKM/XI/2012, seperti disajikan pada Tabel 2.

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan (Harahap 2002).

Tabel 2. Standar pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas menurut Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2012

Jenis rasio	Standar	Kriteria
Likuiditas	175% - 200%	Sangat Baik
	150% - ≤ 175%	Baik
	125% - ≤ 150%	Cukup Baik
	≤ 125%	Kurang Baik
Solvabilitas	≥ 110%	Sangat Baik
	> 100% - ≤ 110%	Baik
	90% - 100%	Cukup Baik
	≤ 90%	Kurang Baik
Rentabilitas	≥ 21%	Sangat Baik
	10% - ≤ 21%	Baik
	1% - ≤ 10%	Cukup Baik
	≤ 1%	Kurang Baik

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2012

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar semua hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio rentabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Kontribusi Koperasi pada Pembangunan

Ketaatan koperasi membayar pajak

Ketaatan koperasi membayar pajak merupakan suatu bentuk partisipasi koperasi terhadap pembangunan daerah. Ketaatan koperasi membayar pajak dapat dilihat dari aktivitas pembayaran pajak pada lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Standar nilai yang diterapkan adalah (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013) :

1. Membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan (sangat baik)
2. Membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan (baik)
3. Membayar terlambat $\leq$ seminggu dari waktu yang ditentukan (cukup baik)
4. Membayar terlambat $>$ seminggu dari waktu yang ditentukan (kurang baik)
5. Tidak membayar pajak pada tahun ini (tidak baik)

Rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja

Rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja (RPTK) menggambarkan seberapa besar koperasi berperan dalam pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di wilayah kerjanya, dihitung dengan rumus (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013) :

Rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja

$$= \frac{\text{JumlahTK} - \text{JumlahTK tahun}(n-1)}{\text{JumlahTK tahunsebelumnya}} \times 100\% \dots (1)$$

Keterangan:

- RPTK $> 15,0\%$ (sangat baik)
- RPTK $10,0\% - 14,9\%$ (baik)
- RPTK $5,0\% - 9,9\%$ (cukup baik)
- RPTK $0,1\% - 4,9\%$ (kurang baik)
- Tidak ada RPTK (tidak baik)

Rasio tingkat upah karyawan

Rasio tingkat upah karyawan (RTUK) menggambarkan perbandingan antara besarnya upah karyawan rata-rata terhadap besarnya upah minimum yang berlaku, dirumuskan sebagai (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013) :

Rasio tingkat upah karyawan

$$= \frac{\text{Besar upah karyawan rata - rata}}{\text{Besar upah minimum yang berlaku}} \times 100\% \dots (2)$$

Keterangan:

- RTUK $> 200\%$ (sangat baik)
- RTUK $151\% - 200\%$ (baik)
- RTUK $101\% - 150\%$ (cukup baik)
- RTUK $81\% - 100\%$ (kurang baik)
- RTUK $\leq 80\%$ (tidak baik)

Kesejahteraan Anggota Koperasi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga

Analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan anggota KUD Mina Jaya dilakukan dengan menggunakan kriteria Sajogyo, yaitu pendekatan pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan per kapita per tahun setara beras. Usaha ikan tangkap memiliki tiga musim, yaitu musim barat, musim normal, dan musim timur. Oleh karena itu, pengeluaran rumah tangga juga didata dari setiap musim. Setelah pengeluaran rumah tangga pada setiap musim diperoleh, maka seluruh pengeluaran pada setiap musim dijumlahkan, sehingga menjadi pengeluaran rumah tangga per tahun. Pengeluaran rumah tangga per tahun tersebut dibagi dengan jumlah tanggungan rumah tangga nelayan sehingga disebut pengeluaran per kapita per tahun.

Pengeluaran per kapita per tahun kemudian dibagi dengan harga beras per kilogram yang disebut pengeluaran per kapita per tahun setara beras dan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan. Secara matematis tingkat pengeluaran per kapita per tahun pada rumah tangga nelayan dan tingkat pengeluaran per kapita per tahun setara beras dapat dirumuskan sebagai Macam-macam rasio keuangan menurut Riyanto (2001) adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Pengeluaran/kapita/tahun (Rp)

$$= \frac{\text{Pengeluaran RT per tahun}}{\text{Jumlah tanggungan keluarga}} \times 100\% \dots (3)$$

Pengeluaran/kapita/tahun setara beras

$$= \frac{\text{Pengeluaran per kapita per tahun}}{\text{Harga beras}} \times 100\% \dots (4)$$

Menurut Sajogyo (1997), kriteria tingkat kesejahteraan berdasarkan besarnya pengeluaran per kapita per tahun yang diukur dengan harga atau nilai beras setempat adalah:

1. Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari 240 kg setara nilai beras/tahun.
2. Miskin sekali, apabila pengeluaran/ksapita/tahun antara 240-360 kg setara nilai beras/tahun.
3. Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 361-480 kg setara nilai beras/tahun.
4. Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 481-960 kg setara nilai beras/ tahun.
5. Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/ tahun lebih tinggi dari 960 kg setara nilai beras/tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUD Mina Jaya memiliki tujuh unit usaha, yaitu pelelangan ikan, pengadaan bahan bakar minyak (BBM), usaha simpan pinjam, unit usaha waserda, penyewaan ruko, pengadaan air bersih, dan pengadaan alat tangkap nelayan. Pada ke tujuh unit usaha tersebut, masih ada unit usaha yang kurang berhasil, yaitu unit usaha waserda dan pengadaan alat tangkap nelayan. Pada unit usaha waserda masih banyak karyawan yang menunggak pembayaran, sedangkan unit usaha pengadaan alat tangkap nelayan merupakan unit usaha yang kurang diminati anggota. Nelayan anggota KUD Mina Jaya tidak membeli alat tangkapnya di koperasi, karena alat tangkap yang dijual di luar koperasi memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah.

Responden pada penelitian ini berjumlah 92 orang yang terdiri dari 9 orang juragan, 9 orang nahkoda, 9 orang KKM, dan 9 orang ABK pada kapal dengan ABK > 10 orang, serta 14 orang juragan, 14 orang nahkoda, 14 orang KKM, dan 14 orang ABK pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang. Umur responden berkisar antara 24-60 tahun. Seluruh nelayan responden pernah mendapatkan

pendidikan formal dengan tingkat pendidikan formal terendah tidak tamat SD dan tertinggi adalah tamat SMA. Usaha lain yang dilakukan nelayan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya adalah berdagang, rental mobil, pengrajin ikan asin, dan buruh bangunan.

Kinerja Koperasi sebagai Badan Usaha

Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan KUD Mina Jaya digolongkan menjadi tiga, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kinerja KUD Mina Jaya dilihat dari analisis rasio keuangannya pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan kinerja keuangan KUD Mina Jaya tahun 2009-2013, dapat diketahui bahwa KUD Mina Jaya memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Akan tetapi, KUD Mina Jaya cenderung mengalami penurunan pada rasio likuiditas. Sementara rasio solvabilitas dan rentabilitasnya cenderung meningkat. Hal itu disebabkan oleh KUD Mina Jaya yang lebih cenderung melakukan peningkatan harta tetap, seperti pembangunan ruko dan pembelian peralatan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2012), KUD Mina Jaya dikategorikan sangat baik berdasarkan rasio solvabilitas dan rentabilitas, tetapi masih dalam kategori baik berdasarkan rasio likuiditas.

Nilai rata-rata rasio likuiditas KUD Mina Jaya adalah 156,99, artinya setiap Rp1,00 total hutang lancar yang dimiliki, dijamin dengan Rp1,57 total aktiva lancar. Nilai rata-rata rasio solvabilitas KUD Mina Jaya adalah 132,33 persen, artinya setiap Rp1,00 total hutang yang dimiliki, dijamin dengan Rp1,32 total aktiva. Nilai rata-rata rasio rentabilitas KUD Mina Jaya adalah 33,87 persen, artinya setiap Rp1,00 modal sendiri, memperoleh keuntungan sebesar Rp0,34. Keberhasilan KUD Mina Jaya sebagai badan usaha ditinjau dari rasio keuangan adalah sangat baik berdasarkan rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas, tetapi masih pada kategori baik berdasarkan rasio likuiditas.

Koperasi pada Pembangunan

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2012), penilaian tingkat kontribusi koperasi terhadap pembangunan dapat dilihat dari ketaatan koperasi membayar pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan tingkat upah karyawan. Kontribusi KUD Mina Jaya pada pembangunan di Provinsi

Lampung tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan ketaatan KUD Mina Jaya membayar pajak tahun 2009-2013, terlihat bahwa KUD Mina Jaya pada empat tahun terakhir telah membayar pajak tepat waktu, sehingga dapat dikategorikan telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah dalam kategori baik

Kontribusi

Analisis kontribusi koperasi pada pembangunan dapat dilihat dari rasio penyerapan tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja tahun ini dikurang jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, terlihat bahwa KUD Mina Jaya sudah menyerap tenaga kerja, sehingga telah berkontribusi dalam proses penurunan tingkat pengangguran, dengan kategori baik menurut standar pemeringkatan koperasi (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM 2013). Penilaian kontribusi koperasi pada pembangunan

dapat pula dilakukan dengan dilihat dari rasio tingkat upah karyawan. Berdasarkan kontribusi KUD Mina Jaya pada pembangunan, dapat diketahui bahwa KUD Mina Jaya juga telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah dalam kategori pemberian upah pada karyawan dengan kategori baik berdasarkan kriteria Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013.

Tabel 3. Kinerja keuangan KUD Mina Jaya berdasarkan analisis rasio keuangan, tahun 2009 – 2013 (%)

Tahun	Likuiditas	Solvabilitas	Rentabilitas
2009	167,21	124,25	35,45
2010	179,01	108,09	24,07
2011	155,24	132,12	32,11
2012	142,32	135,24	37,64
2013	141,17	161,96	40,08
Rata-Rata	156,99	132,33	33,87

Sumber : Laporan keuangan KUD Mina Jaya, 2010-2014 (data diolah)

Tabel 4. Kontribusi KUD Mina Jaya pada pembangunan di Provinsi Lampung berdasarkan ketaatan koperasi membayar pajak, rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan rasio tingkat upah karyawan, tahun 2009-2014

a. Ketaatan KUD Mina Jaya membayar pajak				
Tahun	Waktu pembayaran pajak	Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak**		Kategori*
2009	1 Oktober 2010	30 September 2010		Cukup Baik
2010	12 September 2011	30 September 2011		Baik
2011	10 September 2012	29 September 2012		Baik
2012	26 Agustus 2013	27 September 2013		Baik
2013	15 September 2014	30 September 2014		Baik
b. Rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja				
Tahun	Jumlah tenaga kerja tahun ini (orang)	Jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya (orang)	Rasio penyerapan tenaga kerja (persen)	Kategori*
2010	20	18	11,11	Baik
2011	24	20	20,00	Sangat Baik
2012	26	24	8,33	Cukup Baik
2013	27	26	3,85	Kurang Baik
2014	32	27	18,52	Sangat Baik
Rata-rata	26	23	12,36	Baik
c. Rasio tingkat upah karyawan KUD Mina Jaya				
Tahun	Rata-rata upah karyawan (Rp)	Upah minimum Provinsi Lampung (Rp)***	Rasio tingkat upah (persen)	Kategori*
2010	1.250.000	767.500	162,87	Baik
2011	1.500.000	855.000	175,44	Baik
2012	1.700.000	975.000	174,36	Baik
2013	1.800.000	1.150.000	156,52	Baik
2014	2.000.000	1.399.037	142,96	Cukup Baik
Rata-rata	1.650.000	1.029.307	162,43	Baik

Keterangan : * = Berdasarkan pedoman pemeringkatan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

** = Menurut Dirjen Pajak (enam bulan setelah dikeluarkannya SPPT

*** = sumber : www.regionalinvestment.com

Tabel 5. Pengeluaran rumah tangga nelayan anggota KUD Mina Jaya Kota Bandar Lampung pada kapal dengan ABK > 10 orang dan pada kapal dengan ABK ≤ 10 orang, tahun 2014

a.		Kapal dengan ABK > 10			
	Pengeluaran	Juragan	Nahkoda	KKM	ABK
	Total pengeluaran pangan/thn (Rp)	14.813.000	10.398.000	10.354.889	10.302.889
	Total pengeluaran non pangan/thn (Rp)	28.928.056	9.674.667	12.080.000	11.395.000
	Total Pengeluaran	43.741.056	20.072.667	22.434.889	21.697.889
b.		Kapal dengan ABK ≤ 10			
	Pengeluaran	Juragan	Nahkoda	KKM	ABK
	Total pengeluaran pangan/thn (Rp)	13.423.229	12.192.286	11.807.143	10.553.762
	Total pengeluaran non pangan/thn (Rp)	19.369.194	9.066.319	9.962.504	8.905.617
	Total Pengeluaran	32.792.423	21.258.604	21.769.646	19.459.379

Tabel 6. Tingkat kesejahteraan nelayan anggota KUD Mina Jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan kriteria Sajogyo, tahun 2014

Nelayan pada kapal dengan ABK > 10	Kriteria Sajogyo	Paling miskin (<240)	Miskin sekali (240-360)	Miskin (361-480)	Cukup (481-960)	Hidup layak (>960)	Jumlah
Juragan	Jumlah (orang)	0	0	0	1	8	9
	Persentase (%)	0,00	0,00	0,00	11,11	88,89	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	0,00	0,00	824,53	1.403,48	1.459,46
Nahkoda	Jumlah (orang)	0	0	5	3	1	9
	Persentase (%)	0,00	0,00	55,56	33,33	11,11	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	0,00	403,65	656,67	1.911,20	661,29
KKM	Jumlah (orang)	0	0	1	7	1	9
	Persentase (%)	0,00	0,00	11,11	77,78	11,11	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	0,00	384,08	602,01	1.075,20	665,59
ABK	Jumlah (orang)	0	0	1	7	1	9
	Persentase (%)	0,00	0,00	11,11	77,78	11,11	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	0,00	479,00	695,32	1.286,50	734,19
Nelayan pada kapal dengan ABK ≤ 10	Kriteria Sajogyo	Paling miskin (<240)	Miskin sekali (240-360)	Miskin (361-480)	Cukup (481-960)	Hidup layak (>960)	Jumlah
Juragan	Jumlah (orang)	0	0	2	11	1	14
	Persentase (%)	0,00	0,00	14,29	78,57	7,14	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	0,00	416,94	712,72	994,78	699,44
Nahkoda	Jumlah (orang)	0	0	2	11	1	14
	Persentase (%)	0,00	0,00	14,29	78,57	7,14	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	0,00	452,56	695,73	1.293,75	702,63
KKM	Jumlah (orang)	0	0	3	10	1	14
	Persentase (%)	0,00	0,00	21,43	71,43	7,14	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	0,00	458,81	627,41	1.262,44	635,40
ABK	Jumlah (orang)	0	1	2	11	0	14
	Persentase (%)	0,00	7,14	14,29	78,57	0,00	100,00
	Rata-rata (kg)	0,00	315,58	435,78	668,84	0,00	584,86

Kesejahteraan Anggota Koperasi

Indikator terakhir yang digunakan untuk mengukur keberhasilan KUD Mina Jaya adalah tingkat kesejahteraan anggota. Tingkat kesejahteraan anggota dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran per kapita per tahun setara beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan,

dimana pengeluaran rumah tangga juragan lebih besar dibandingkan pengeluaran rumah tangga nahkoda, KKM, dan ABK. Pengeluaran rumah tangga nelayan pada kapal dengan ABK > 10 dan nelayan pada kapal dengan ABK ≤ 10 disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga anggota KUD Mina Jaya pada kapal dengan ABK

> 10 orang tahun 2014, dapat diketahui bahwa nelayan pada kapal dengan ABK > 10 orang memiliki pengeluaran non pangan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pangan, kecuali pada strata nahkoda. Hal ini menunjukkan bahwa juragan, KKM, dan ABK sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Sementara pada Tabel 5 juga terlihat bahwa pada kapal dengan ABK $\leq$ 10 orang, hanya juragan yang memiliki pengeluaran non pangan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Yuseva, dkk (2015), yang mengidentifikasi seluruh petani Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu memiliki pengeluaran non pangan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pangan, sedangkan pada penelitian ini, hanya sebagian strata yang memiliki pengeluaran non pangan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pangannya.

Berdasarkan kriteria Sajogyo (1997) seperti yang disajikan pada tingkat kesejahteraan nelayan anggota KUD Mina Jaya berdasarkan kriteria Sajogyo, sebagian besar nelayan pada kapal dengan ABK > 10 sudah memperoleh kesejahteraan dengan kategori cukup, bahkan 88,89 persen juragan sudah masuk dalam kategori hidup layak. Pada strata nahkoda, 66,67 persen nahkoda masih dalam kategori nyaris miskin, tetapi 77,78 persen KKM dan ABK sudah dalam kategori cukup.

Berdasarkan tingkat kesejahteraan nelayan anggota KUD Mina Jaya kriteria Sajogyo tahun 2014, dapat diketahui bahwa pada kapal dengan ABK $\leq$ 10, masih ada rumah tangga yang tergolong miskin sekali, yaitu strata ABK. Akan tetapi sebagian besar nelayan pada kapal dengan ABK $\leq$ 10 sudah memperoleh kesejahteraan dengan kategori cukup, begitu pula dengan juragannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadilah, dkk (2014) yang juga menggunakan kriteria Sajogyo (1997). Kesejahteraan rumah tangga nelayan obor di Kecamatan Teluk Betung Selatan sebagian besar masuk dalam kriteria cukup. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri, dkk (2013) yang juga menggunakan kriteria Sajogyo (1997). Sebagian besar petani padi organik peserta SL-PTT dan petani padi organik non peserta SL-PTT di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu memiliki tingkat kesejahteraan dengan kriteria hidup layak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan KUD Mina Jaya sebagai badan usaha ditinjau dari rasio keuangan adalah sangat baik berdasarkan rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas, tetapi masih pada kategori baik berdasarkan rasio likuiditas. KUD Mina Jaya telah berkontribusi dengan baik terhadap pembangunan di Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga 2014, dengan kategori baik pada ketaatan koperasi membayar pajak, rata-rata rasio penyerapan tenaga kerja, dan rata-rata rasio tingkat upah karyawan. KUD Mina Jaya cukup berhasil menyejahterakan anggotanya dengan kriteria cukup, bahkan sebagian besar juragan pada kapal dengan ABK > 10 orang sudah masuk dalam kategori hidup layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni E. 2008. Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Analisis Rasio. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3(2): 109–118. <http://ojs.polinpdg.ac.id/>. [27 Maret 2015]
- Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM. 2013. *Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. 2014. *Rekapitulasi Data Berdasarkan Provinsi*. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Fadilah, Abidin Z, dan Kalsum U. 2014. Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah tangga Nelayan Obor di Kota Bandar Lampung. *JIAA* 2(1): 71–76. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/issue/view/68/showToc>. [25 Maret 2016].
- Fadli UM, Isyanto P, dan Andriyati T. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Karyawan Kantor Kementerian Agama Karawang. *Jurnal Manajemen* 9(4): 842–853. <http://jurnal.feunsika.ac.id/>. [27 Maret 2015]
- Hanel A. 1989. *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Harahap SS. 2002. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2012. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 129/Kep./M/KUKM/ XI/2012. *Standar Pengukuran*

- Rasio Keuangan Koperasi.*
- KUD Mina Jaya. 2014. *Laporan Pertanggung-jawaban KUD Mina Jaya Tahun 2014.* KUD Mina Jaya. Bandar Lampung.
- Putri TL, Lestari DAH, dan Nugraha A. 2013. Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Padi Organik Peserta Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *JIIA* 1(3): 226–231. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/577/539>. [25 Maret 2016].
- Riyanto B. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat.* Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Sajogyo. 1997. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan.* LPSB IPB. Bogor:
- Yuseva HA, Qurniati R, dan Hilmanto R. 2015. Analisis Finansial dan Komposisi Tanaman dalam Rangka Persiapan Pengajuan Izin HKm (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Sylva Lestari* 3(1):31–40. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/>. [10 April 2015]